

TUNGGAKAN KEMENKES PULUHAN MILIAR RUPIAH

BOR RS Mengkhawatirkan, Perlu Formulasi

YOGYA (KR) - Tingkat keterisian tempat tidur atau Bed Occupancy Rate (BOR) di rumah sakit yang menangani pasien Covid-19, semakin mengkhawatirkan. Di samping penuh, terdapat persoalan teknis pengisian pasien. Kondisi tersebut dibutuhkan formulasi penanganan agar pasien yang membutuhkan perawatan medis dapat terjamin.

Ketua Pansus Covid-19 DPRD Kota Yogya Antonius Fokki Ardiyanto, mengungkapkannya tengah menyusun rekomendasi atas hasil pengawasan yang dilakukan oleh tim pansus. “Kami sudah melakukan sidak di rumah sakit swasta maupun pemerintah. Rapat koordinasi dengan instansi teknis juga sudah. Ada beberapa yang berhasil kami petakan. Terutama menyangkut BOR rumah sakit dan tunggakan dari Kementerian Kesehatan (Kemenkes) karena cukup mendesak butuh so-

lusi,” urainya, Senin (21/6). Sidak di rumah sakit dilakukan akhir pekan lalu, yakni di RSUD Kota Yogya selaku rumah sakit rujukan Covid-19 unsur pemerintah dan RS Bethesda dari unsur swasta. Dari kedua rumah sakit tersebut diketahui jika BOR untuk penanganan pasien Covid-19 sudah sangat mengkhawatirkan. Fokki menyebut, RSUD Kota Yogya memiliki 40 bed dan 7 bed khusus ICU. Sedangkan di RS Bethesda total ada 50 bed yang disiapkan untuk pasien Covid-19. Tingkat

keterisian kamar tersebut pun cukup dinamis. Tetapi rata-rata sudah di atas 85 persen. “Tidak bisa dipastikan. Misal hari ini sudah terisi 100 persen, kemudian besok berkurang menjadi 85 persen. Namun masih ada antrean yang akan masuk,” katanya. Di samping itu, meski okupansi masih 85 persen, namun tidak setiap antrean bisa masuk untuk menempati kamar yang kosong. Hal ini karena ketentuan teknis terkait jenis kelamin maupun status disabilitas. Dicontohkannya jika dalam satu ruang terdapat

tiga bed, dan sudah terisi satu bed oleh pasien perempuan, maka jika ada pasien laki-laki yang akan masuk otomatis tertolak. Pasalnya dua bed yang kosong tersebut tidak boleh diisi oleh lawan jenis. Kondisi itu ditemukan di RSUD dan tidak menutup kemungkinan juga terjadi di rumah sakit lain. Menurut Fokki, kondisi tersebut membutuhkan formulasi penanganan. Hal ini karena BOR masih 85 persen namun belum semua kamar kosong bisa langsung diisi. “Ini fakta yang harus segera dicarikan formulasi penanganannya. Mengingat, di luar masih ada pasien yang antre. Tetapi untuk kebutuhan oksigen, tidak ada persoalan karena RSUD sudah tersentral,” tandasnya. Formulasi persoalan BOR di

rumah sakit salah satunya bisa dilakukan dengan penambahan kapasitas kamar maupun rumah sakit rujukan. Bahkan jika memungkinkan perlu dibangun rumah sakit lapangan dengan koordinasi di tingkat provinsi. Apalagi Yogya merupakan ibukota provinsi sehingga kerap menjadi rujukan dari kabupaten lain. “Dengan melihat situasi di kedua rumah sakit tersebut maka dapat diambil kesimpulan sementara bahwa situasi ini harus segera diantisipasi oleh Pemkot Yogya. Sehingga kemungkinan terburuk dari situasi pandemi Covid-19 dapat tertangani dengan baik dan keselamatan rakyat adalah hukum tertinggi dalam penyelenggaraan pemerintahan,” harapnya. Meski demikian, di luar itu pihaknya turut mendapati

fakta mencengangkan terkait tunggakan Kemenkes di dua rumah sakit tersebut. Tidak tanggung-tanggung, totalnya mencapai Rp 26 miliar, yakni RSUD Kota Yogya sebesar Rp 16 miliar dan RS Bethesda Rp 10 miliar. Tunggakan itu berkaitan dengan klaim pelayanan periode akhir 2020 hingga bulan kemarin. Tunggakan dari Kemenkes itu pun bisa semakin besar karena setidaknya terdapat tujuh rumah sakit rujukan Covid-19 di Kota Yogya. “Melihat situasi ini maka pansus mengharapkan kepada Walikota Yogya dan Gubernur DIY untuk bisa segera berkoordinasi dengan Kemenkes RI agar proses-proses pencairan klaim selama dokumennya lengkap segera dapat ditindanjudi,” jelas Fokki. (Dhi)-d

Vaksinasi Mampu Melindungi Paparan Virus

YOGYA (KR) - Vaksinasi masih mampu melindungi manusia dari paparan virus Korona B.1.617.2 atau varian delta. Vaksin memberikan perlindungan dibandingkan mereka yang tidak divaksinasi, meski risiko reinfeksi tetap ada namun gejalanya lebih ringan.

“Jadi vaksinasi yang dilakukan saat ini masih mampu memberikan perlindungan termasuk varian delta, daripada yang belum divaksin. Terutama peluang agar masyarakat tidak dirawat di Rumah Sakit (RS) atau apabila terinfeksi Covid-19 masuk kategori ringan dan hanya perlu isolasi mandiri, itu menurut penelitian,” ujar Ketua Kelompok Kerja Genetik Fakultas Kedokteran, Kesehatan Masyarakat dan Keperawatan (FKMKM) UGM dr Gunadi SpBA, PhDdi Gedhong Pracimosono Komplex Kepatihan, Senin (21/6).

Diakui, masih dilakukan penelitian perlindungan yang diberikan vaksin Covid-19 tersebut di Indonesia. Ternyata ada yang turun efek protektifnya, namun secara umum vaksin Covid-19 tetap ada efek perlindungannya. Setelah pemberian vaksinasi dengan dosis dua kali, harus ada booster yang waktunya masih dalam penelitian.

Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) drg Pembajun Setyaningastutie MKes menyatakan, penegakan protokol kesehatan (Prokes) menjadi suatu keharusan

Dosen UP’45’ Mengadu ke DPRD DIY

YOGYA (KR) - Belasan dosen dan karyawan Universitas Proklamasi (UP) ‘45’ mendatangi DPRD DIY, Senin (21/6). Mereka mengaku diperlakukan tidak adil oleh pihak yayasan kampus. Seperti jam kerja berlebih, upah serta kontrak kerja yang tidak sesuai. Secara internal mereka masih berstatus karyawan kontrak, namun oleh kampus dinyatakan tetap.

“Soal penggajian, dosen digaji kurang dari 50 persen dan sisanya tunjangan tetap dengan catatan. Kalau catatan tak dipenuhi maka dipotong. Tak ada sistem penjenjangan, klasifikasi jabatan tidak dibedakan,” ujar Ketua Serikat Dosen Karyawan UP ‘45’ Habib Abdillah Nurusman.

Sementara itu Ketua DPRD DIY, Nuryadi akan berupaya menindaklanjuti dengan mengundang pihak-pihak terkait dan melakukan klarifikasi.

(Awh)-d

Gerakan Restorasi Sungai Butuh Kepedulian

YOGYA (KR) - Gerakan restorasi sungai dibutuhkan kepedulian bersama semua pihak. Hal ini agar upaya yang telah dibangun oleh para pegiat kelestarian lingkungan dapat mendapati hasil yang maksimal. Salah satu sungai ikon Kota Yogya yang membutuhkan restorasi ialah Kali Code. Sungai tersebut bahkan menjadi wajah Kota Yogya karena berada tepat membelah di bagian tengah kota. “Kondisinya bisa dibidang memprihatinkan karena limbah padat dan cair sudah di atas ambang batas,” tandas Ketua Gerakan Cinta Code, Harris Syarif Usman, Senin (21/6).

Menurut Sekretaris Pemerti Code tersebut, pencemaran itu membuat Kali Code semakin tidak sehat. Oleh sebab itu dibutuhkan kepedulian dari semua pihak untuk merestorasi Kali Code agar sungai yang menjadi kearifan lokal Kota Yogya ini kembali bersih, sehat dan hijau.

Dirinya pun mengapresiasi aksi kepedulian dari kalangan lembaga dakwah dan mahasiswa dengan menjadikan Kali Code sebagai sasaran peringatan Hari Lingkungan Hidup Sedunia.

Aksi peduli itu digelar oleh Majelis Lingkungan Hidup (MLH) Pimpinan Daerah Muhammadiyah (PDM) Kota Yogya serta Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) Djasman Alkindi pada Minggu (20/6) lalu. Pada kesempatan itu, Ketua MLH PDM Kota Yogya Heri Setiawan MSI serta Ketua IMM Djasman Alkindi Baiq Sukma Chalifa beserta jajarannya menebar bibit ikan endemik sungai serta menanam sejumlah bibit pohon di pinggir sungai. Pohon yang ditanam pun disesuaikan dengan daerah kawasan pinggir sungai seperti pohon buah rambutan, jambu air, alpokat, cabai maupun terong.

(Dhi)-d

PENGUMUMAN LELANG KEDUA EKSEKUSI HAK TANGGUNGAN

Berdasarkan pasal 6 Undang-Undang Hak Tanggungan Nomor 4 Tahun 1996, PT BPR BERLIAN BUMI ARTA dengan perantaraan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Yogyakarta akan melaksanakan lelang Eksekusi Hak Tanggungan terhadap obyek jaminan atas nama debitur sebagai berikut :
Yosep Pranoto
Sebidang tanah dan bangunan berikut turutan diatasnya sesuai dengan SHM No: **No.414**, Terletak di Desa/Kel. Sendangadi, Kec. Sleman, Kab. Sleman Daerah Istimewa Yogyakarta. Luas **470 m2**, atas nama **Nyonya Raminem**
- Harga Limit Rp. 499.500.000,-
- Uang Jaminan Rp. 99.900.000,-
Pelaksanaan Lelang:
Hari, tanggal : Selasa, 06 Juli 2021
Pukul : 13.00 Waktu Server (sesuai WIB)
Tempat : KPKNL Yogyakarta
Jalan Kusumanegara no11 Yogyakarta

Syarat-Syarat Lelang :

1. Cara penawaran lelang dilaksanakan dengan penawaran secara tertulis tanpa kehadiran peserta lelang melalui Internet, dengan penawaran secara internet closed bidding (Penawaran secara tertutup) yang diakses pada system Domain **www.lelang.go.id** Tata cara mengikuti lelang Email dapat dipilih pada menu tata cara dan penggunaan pada Domain tersebut.
2. Pendaftaran calon peserta lelang berupa perseorangan ataupun Badan Usaha. Calon peserta lelang berupa perorangan mendaftarkan diri dan mengaktifkan Akun pada Aplikasi Lelang Internet pada alamat Domain angka 1 dengan merekam dan mengunggah softcopy (Scan) KTP, NPWP (Ekstensi File.jpg atau .png) dan nomor rekening atas nama sendiri (uang jaminan akan dikembalikan langsung ke nomor tersebut. Calon peserta lelang berupa Badan Usaha sebagai kuasa Badan Usaha mendaftarkan diri dan mengaktifkan akun sebagaimana penjelasan di atas, kemudian tambah organisasi dengan melengkapi data organisasi perusahaan yang akan diwakilkan, merekam dan mengunggah softcopy (Scan) KTP Badan Usaha, NPWP Badan Usaha (Ekstensi File.jpg atau .png).
3. Waktu Pelaksanaan
a) Penawaran lelang diajukan melalui alamat Domain diatas sejak pengumuman lelang ini terbit sampai dengan hari Selasa 06 Juli 2021, Pukul 13.00 waktu Server.
b) Pembukaan penawaran lelang oleh pejabat lelang dilakukan pada hari Selasa 06 Juli 2021 pukul 13.00 Waktu server
c) Peserta lelang diharapkan menyelesaikan diri dengan pengguna waktu server yang tertera pada alamat Domain diatas.
4. Uang jaminan lelang
Peserta lelang diwajibkan menyeter uang jaminan lelang dengan ketentuan sebagai berikut :
a) Setoran uang jaminan lelang harus sudah aktif diterima KPKNL Yogyakarta selambat-lambatnya 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan lelang (hari Senin Tanggal 05 Juli 2021, Pukul 16.00 waktu server (sesuai WIB)
b) Uang jaminan lelang disetorkan ke nomor Virtual Account (VA) masing-masing peserta. Lelang nomor Virtual Account akan dikirim secara otomatis dari alamat Domain diatas kepada masing-masing peserta lelang setelah berhasil melakukan pendaftaran dan data identitas dinyatakan Valid
5. Penawaran Lelang
a) Penawaran harga lelang menggunakan Token yang akan dikirim secara otomatis dari alamat Domain diatas kepada Email masing-masing peserta lelang setelah uang jaminan lelang dinyatakan sah dan peserta lelang tidak masuk daftar hitam (blacklist).
b) Penawaran lelang dimulai limit dan dapat diajukan berkali-kali sampai batas waktu sebagaimana angka 3 Huruf a dan harga penawaran yang dianggap sah dan mengikat adalah penawaran yang tertinggi.
6. Pelunasan Lelang
Pemenang lelang harus melunasi harga pembelian dan biaya lelang sebesar 2% ditunjang ke nomor VA pemenang lelang paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah pelaksanaan lelang. Apabila wanprestasi atau tidak melunasi kewajiban pembayaran sesuai ketentuan diatas pemenang lelang dikenakan sanksi tidak diperbolehkan mengikuti lelang selama 6 (enam) bulan diseluruh Indonesia dan uang jaminan lelang akan disetorkan ke kas Negara. Pemenang lelang akan dikenakan BPHTB sesuai yang berlaku.
7. Obyek lelang dijual dalam keadaan apa adanya dengan segala konsekuensi biaya tertunggak atas obyek lelang peserta lelang dianggap telah mengetahui / memahami kondisi obyek lelang yang dibelinya.
8. Karena satu hal pihak penjual dan atau pejabat lelang dapat melaksanakan pembatalan / penundaan lelang terhadap obyek lelang dan pihak yang berkepentingan / peminat tidak dapat melakukan tuntutan atau keberatan dalam bentuk apapun itu kepada pihak penjual dan / atau pejabat lelang KPKNL Yogyakarta dan kantor pusat DJKN.
9. Untuk informasi lebih lanjut mengenai obyek lelang dapat menghubungi : PT BPR BERLIAN BUMI ARTA, Jl Magelang KM 5,2 Sinduadi Mlati Sleman Yogyakarta Telp (0274) 566294, 6235333. Fax (0274)

Sleman, 22 Juni 2021

Ttd

**PT. BANK PERKREDITAN RAKYAT
BERLIAN BUMI ARTA**

Sosialisasi Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Pemangku Kebijakan Bersinergi Beri Perlindungan



KR-Juwintanto

Anggota DPRD DIY Komisi D Imam Priyono D Putranto SE MSI saat memberikan materi bersama perwakilan DP3AP2 DIY Arif Nasiruddin SPsi MA, dan Agus Ruyanto dari LSPPA, Senin (21/6) pagi di Jagran RW 02 Pringgokusuman, Gedongtengen, Yogya

YOGYA (KR) -- Kekerasan verbal, masih dirasakan perempuan dan anak, terutama dari keluarga miskin. Seperti saat masuk sekolah, banyak anak dari keluarga kurang mampu harus masuk di sekolah swasta yang harus membayar mahal. Demikian pula saat masuk di sekolah negeri tidak mampu membeli seragam, sering dipanggil pihak sekolah karena tidak mampu membayar SPP dan lainnya. Pemberian tekanan psikologis dan mental pada anak yang harus dilindungi secara sinergis oleh pemangku kebijakan. “Anak menjadi minder, dalam kondisi seperti ini negara harus hadir memberikan perlindungan,” tegas Anggota DPRD Komisi D Imam Priyono D Putranto SE MSI Senin (21/6) pagi dalam acara Sosialisasi Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di Jagran RW 02 Pringgokusuman, Gedongtengen, Yogya. Sosialisasi yang diselenggarakan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk (DP3AP2) DIY ini juga menghadirkan narasumber Kepala Seksi Data Informasi Gender dan Kerjasama DP3AP2 DIY Arif Nasiruddin SPsi MA dan dari Lembaga Studi Pengembangan Perempuan

dan Anak (LSPPA) Agus Ruyanto. Acara dihadiri ibu-ibu PKK dan tokoh masyarakat di Jagran dengan prokes. “Mari kita selesaikan masalah kekerasan verbal pada anak-anak sekolah yang kurang mampu, demikian juga kekerasan verbal pada perempuan dengan sinergi semua pemangku kebijakan (eksekutif, legislatif, yudikatif) untuk menghasilkan regulasi kebijakan yang memberi perlindungan,” ucap Imam. Lebih lanjut Agus Ruyanto dari LSPPA menyebutkan kekerasan pada perempuan karena masih adanya stigma di masyarakat dengan diskriminasi gender tentang perempuan yang lemah dan lelaki yang kuat. “Perempuan masih dianggap hanya berperan melahirkan, berandan dan di dapur. Padahal saat ini sudah banyak perempuan mandiri dan berprestasi justru menjadi tulang punggung keluarga,” ujarnya. Agus menegaskan perempuan mempunyai hak dan tanggungjawab yang sama dengan laki-laki. “Perempuan setara dengan laki-laki. Dalam keluarga suami dan istri berbagi peran yang seimbang dalam menciptakan ketahanan keluarga yang tangguh dan berkualitas,” jelasnya. Sedangkan Arif Nasiruddin SPsi MA dari

DP3AP2 DIY menyatakan dipilihnya Jagran untuk sosialisasi ini dengan melihat kerawanan kekerasan pada perempuan dan anak yang cukup tinggi di wilayah ini. “Wilayah Jagran di perkotaan yang padat, ada kesenjangan dalam strata sosial warga, dan multikultur banyak pendatang,” jelasnya. Arif menyebutkan dalam perlindungan terhadap anak dari kekerasan, DP3AP2 DIY telah mengupayakan pencegahan antara lain dengan memperkuat aspek legal. “Dilakukan sosialisasi dan edukasi peraturan perundang-undangan Perlindungan Perempuan dan Anak (UUPA, UUPKRT, UUPTPPo, Perda, Pergub, Kepgub),” jelasnya. Kemudian sosialisasi antisipasi kekerasan terhadap remaja, Pelatihan Antisipasi Perdagangan Orang, Pelatihan Penanganan Korban Kekerasan yang responsif gender bagi petugas PPT Provinsi/Kab/Kota, Pelatihan Penanganan ABH, Pelatihan Antisipasi Kekerasan bagi Guru BK, sarasehan, seminar, dan kajian-kajian Gerakan Untuk Pencegahan. “Juga Fasilitasi Forum Anak Daerah,” jelasnya. Sedangkan upaya penanganan dilakukan dengan memberikan layanan Pengaduan, Rumah

amah/Shelter, layanan kesehatan, pendampingan hukum rehabilitasi sosial, dan pembentukan Pusat Pelayanan Terpadu Perempuan dan Anak (P2TPA) DIY Rekso Dyah. “Mengkoordinasikan dan mensinkronkan pencegahan dan penanganan pelayanan Pusat Pelayanan Terpadu (PPT) di masing-masing instansi dan lembaga yang tergabung dalam keanggotaan Forum Koordinasi Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan (FPKK), juga melakukan pencatatan dan Pelaporan Korban melalui Sistem Online. “Juga dilakukan upaya pemberdayaan dengan pemberian pelatihan pasca pendampingan : pelatihan dan sapras untuk usaha,” jelasnya. Lebih lanjut layanan korban kekerasan terhadap perempuan dan anak, jelas Arif, juga dapat diakses melalui lembaga-lembaga layanan antara lain P2TPA KK Rekso Dyah Utami di Jalan Balirejo No.29 Mujaumu Yogyakarta telp : 0274 540529 dan layanan Telepon Sahabat anak dan Keluarga (Tesaga) di 0274-565003 atau 0877-1929-2111 serta layanan di Kota Yogyakarta yaitu UPTD PPA Kota Yogyakarta Hotline Service 08112857799. (Vin)